

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MUSI RAWAS

RENCANA KERJA  
(RENJA) TAHUN 2022



Musi Rawas  
**Bumi Agropolitan**

 musi rawas

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah memudahkan seluruh jajaran Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

Dalam Bab III penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi Faktor-faktor keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Lembaga teknis daerah yang membantu Bupati Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun dan merumuskan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman Kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, oleh karena itu sumbang saran dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik demi kemajuan Kabupaten Musi Rawas yang kita cintai.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.

Muara Beliti, Desember 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS**

H. YAMIN PABLII, SE.,M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP 19640917 199301 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2.Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD ..	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	11
2.3. Isu Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	27
2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	28
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	29
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....	29
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	30
4.1. Rencana Kerja	30
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah	32
<b>BAB V PENUTUP</b>	33

## LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan amanah UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pembuatan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyesuaian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 yang berfungsi sebagai

dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Rawas sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Rawas.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 disusun selaras dengan VISI dan MISI yaitu **"TERWUJUDNYA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG DEMOKRATIS, PARTISIPASIF DAN DINAMIS MENUJU MUSI RAWAS MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT (MANTAB)"**. Untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi sesuai dengan peran serta dan tugas pokok Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, yaitu adalah sebagai berikut :

#### **MISI : Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**

<b>1.1.1 Tujuan 1.1</b>	Memantabkan kehidupan masyarakat yang religius dan aman serta menjunjung tinggi nilai kearifan lokal.
<b>Sasaran 1.1</b>	-Terwujudnya peningkatan kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Kepala Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) disusun berdasarkan skala prioritas dan usulan-usulan masyarakat pada musrenbang tingkat Kelurahan maupun Kecamatan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- e. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

- f. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- h. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- j. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- r. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- s. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022. Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 dalam mengoperasionalkan RKPD Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Musi Rawas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB. I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realiasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan dan Fungsi dan Tugas OPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat.

### **BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

### **BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1. Rencana Kerja, diuraikan rencana kerja perubahan melalui program dan kegiatan.
- 4.2. Pendanaan Perangkat Daerah, diuraikan rincian pendanaan setiap program dan kegiatan

## **BAB. V PENUTUP**

Pada bagian ini dijelaskan kesimpulan dan harapan setelah dibuatnya rencana kerja perubahan.

## **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun Lalu dengan Capaian Renstra OPD**

Berdasarkan hasil evaluasi usulan program dan kegiatan tahun 2021 yaitu terdiri dari 6 program dan 11 kegiatan 29 Sub Kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp. 7.179.804.531,- terealisasi sebanyak 6 program dan 23 kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp. 6.805.773.942,-. Hal ini dikarenakan penyeleksian program dan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Tahun 2022 telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas baik dari program nasional maupun program daerah.

**TABEL 1.3.**  
**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN**  
**PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021**

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu	Penyerapan		
			Realisasi (Rp)	Target (%)	Real (%)
1	2	3	4	5	6
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS</b>	<b>3.766.419.531</b>	<b>3.524.953.561</b>	<b>100</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.891.000	187.837.900	100	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.019.800	73.252.100	100	87,18

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.541.700	14.541.700	100	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.531.500	14.531.500	100	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	14.531.500	14.531.500	100	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	14.531.500	14.531.500	100	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Lap. Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	57.735.000	56.449.600	100	97,77
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.814.813.736</b>	<b>2.638.272.362</b>		
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.753.557.736	2.577.016.362	100	93,59
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan pada SKPD	61.256.000	61.256.000	100	100,00
	<b>Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah</b>	<b>34.552.000</b>	<b>34.552.000</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
9	Rekonsilasi dan Penyusunan LBMD pada SKPD	34.552.000	34.552.000	100	100,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>212.465.250</b>	<b>170.826.550</b>		
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	14.956.000	14.956.000	100	100,00
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	24.550.000	100	98,20
12	Penyediaan bahan Logistik Kantor	2.781.250	2.781.250	100	100,00
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.400.000	11.400.000	100	100,00
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.328.000	117.139.300	100	73,99
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>349.455.845</b>	<b>346.359.750</b>		
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	2.250.000	100	100,00

16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.704.000	56.711.807	100	94,99
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	287.201.845	287.097.943	100	99,69
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>155.241.700</b>	<b>147.104.999</b>		
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.741.700	132.604.999	100	94,22
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	14.500.000	14.500.000	100	100,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>335.444.200</b>	<b>335.371.400</b>	<b>100</b>	<b>99,98</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan</b>	<b>335.444.200</b>	<b>335.371.400</b>	<b>100</b>	<b>99,98</b>
20	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	335.444.200	335.371.400	100	99,98
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBAGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>1.110.342.100</b>	<b>997.968.381</b>	<b>100</b>	<b>89,87</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika</b>	<b>1.110.342.100</b>	<b>997.968.381</b>		

	<b>Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitas kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilu kepala daerah serta pemantauan situasi politik</b>				
21	Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitas kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilu kepala daerah serta pemantauan situasi politik	47.244.800	45.221.500	100	95,72
22	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan dan partai politik, pemilukada serta pemantauan	1.063.097.300	952.746.881	100	89,62
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>272.049.100</b>	<b>271.410.100</b>	<b>100</b>	<b>99,77</b>
	<b>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>	<b>272.049.100</b>	<b>271.410.100</b>	<b>100</b>	<b>99,77</b>
23	Pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	272.049.100	271.410.100	100	99,77

<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>1.082.580.300</b>	<b>1.073.918.200</b>	<b>100</b>	<b>99,20</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>1.082.580.300</b>	<b>1.073.918.200</b>	<b>100</b>	<b>99,20</b>
24	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	1.082.580.300	1.073.918.200	100	99,20
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>612.969.300</b>	<b>602.152.300</b>	<b>100</b>	<b>98,23</b>
	<b>Perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>612.969.300</b>	<b>602.152.300</b>		
25	Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini. Kerjasma intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan nidang kewaspadaan , serta	160.049.300	150.309.900	100	93,91

	penangan konflik di daerah				
26	Pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	452.920.000	451.842.400	100	99,76
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.179.804.531</b>	<b>6.805.773.942</b>	<b>100</b>	<b>94,79</b>

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

### A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Musi Rawas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dipimpin oleh Kepala Badan dan membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Bidang, yaitu : Sekretariat, Bidang Bina Ideologi, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan serta Bidang Politik yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

### B. Susunan Kepegawaian Dan Perlengkapan

Adapun Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 29 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris yang membawahi :
  - a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
  - b) Sub Bagian Keuangan;
  - c) Sub Bagian Um dan Kepegawaian.

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dikepalai oleh Kepala Bidang yang membawahi :
  - a) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - b) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
  
4. Bidang Politik dalam Negeri dikepalai oleh Kepala Bidang yang membawahi :
  - a) Sub Bidang Politik dan Peningkatan Demokrasi;
  - b) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik
  
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dikepalai oleh Kepala Bidang yang membawahi :
  - a) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
  - b) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

**REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN  
PENDIDIKAN, PANGKAT/GOL.RUANG DAN ESELONERING DI  
LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PENDI DIKAN</b>	<b>PANGKAT/ GOL.RUANG</b>	<b>ESSE LON</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Yamin Pabli	S2	Pembina Utama Muda (IV/c)	II.b	Kepala Badan
2	Imam Musadar, S.STP, M.AP	S2	Pembina Tk. I (IV/b)	III.a	Sekretaris
3	Efridal Iskandar, SE, M.Si	S2	Pembina (IV/a)	III.b	Kepala Bidang
4	H.Paisal, S.Ag, M.Pd	S2	Pembina (IV/a)	III.b	Kepala Bidang
5	Rizal Darmawansyah,	S2	Pembina (IV/a)	III.b	Kepala Bidang
6	S.STP,M.AP	S1	Penata Tk. I (III/d)	III.b	Ka.Sub Bidang
7	Hj. Sumiati, S.Sos	S1	Penata Tk. I (III/d)	IV.a	Ka.Sub Bidang

8	Edy Yanto, SE	S1	Penata Tk. I (III/d)	IV.a	Ka.Sub Bagian
9	Husni, SH	S1	Penata Tk. I (III/d)	IV.a	Ka.Sub Bidang
10	Feri Antony, SH	S1	Penata Tk. I (III/d)	IV.a	Ka.Sub Bidang
11	Debby, S.IP	S1	Penata Tk. I (III/d)	IV.a	Ka.Sub Bidang
12	Candra Armada, SE	S1	Penata Tk. I (III/d)	IV.a	Ka.Sub Bagian
13	Santi, S.Sos	S1	Penata Tk. I (III/c)	IV.a	Ka.Sub Bidang
14	Efran Sutanto, S.IP	S1	Penata (III/c)	IV.a	Ka.Sub Bagian
15	Kasmir, SE	S1	Penata (III/c)	IV.a	Ka.Sub Bagian
16	Purnama, SE	S1	Penata (III/c)	IV.a	Ka.Sub Bidang
17	Dwi Nawangsari, SE	S1	Pembina.Tk.I(IV/b)	-	Staf
18	AD. Oktarianda, SH	S1	Pembina (IV/a)	-	Staf
19	Ibnu Hadromy, S.IP	S1	Pembina.Tk.I(IV/b)	-	Staf
20	Drs.Haidir	S1	Penata Tk. I (III/d)	-	Staf
21	Irfan Seventhree, S.Sos	S1	Penata (III/c)	-	Staf
22	Nelly Agustina, S.IP	S1	Penata Muda (III/a)	-	Staf
23	Junaidi,S.M	D3	Penata Muda (III/a)	-	Staf
24	Devi Yulianti, A.Md	S1	Penata Muda (III/a)	-	Staf
25	Abdul Saleh, S.M	S1	Penata Muda (III/a)	-	Staf
26	Hijjah Mauli Lubis, S.IP	SLTA	Pengatur Tk. I (II/d)	-	Staf
27	Diana Agustin	SLTA	Pengatur Tk. I (II/d)	-	Staf
28	Heriyanto	SLTA	Pengatur (II/c)	-	Staf
29	Anita	SLTA	Pengatur (II/c)	-	Staf
30	Achmad Ardiansyah Hendriadi	SLTA	Pengatur Md Tk. I (II/b)	-	Staf

## C. TUGAS DAN FUNGSI

### 1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Bila mengacu pada Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 29 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Musi Rawas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

## **Tugas Pokok**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten dibidang kesatuan bangsa dan politik.

## **Fungsi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Musi Rawas ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat agama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten musi rawas;
- c. Pelaksanaan Koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat agama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten musi rawas;
- d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat agama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten musi rawas

- kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten musi rawas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bBupati sesuai tugas dan fungsinya.

➤ **SEKRETARIAT**

**Tugas**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**Fungsi**

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengordinasian dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Musi Rawas;
- b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset;
- c. Pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksaan ketatalaksaan, kearsipan dan perpustakaan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Musi Rawas ;
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Musi Rawas;
- f. Pengordinasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi SPIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Musi Rawas;
- g. Pengordinasian pelaksaan SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Musi Rawas;

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Musi Rawas sesuai tugas dan fungsinya.

### **SUB BAGIAN DIBAWAH SEKRETARIS**

- a. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program dan anggaran pengelolaan data dan informasi, pekasanaan monitoring dan evaluasi serta pnyusunan laporan kinerja.
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntasi, verifikasi dan pembukuan, menyusun rencana anggaran keuangan, mengurus kas dan gaji pegawai, mengurus perbendaharaan, mengurus administrasi barang inventaris serta koordinasi dalam penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlekapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

### **➤ BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

#### **Tugas**

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

## **Fungsi**

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun program kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten.
- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten.
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten.
- d. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten.
- f. Pengordinasian Pelaksanaa Standar Operasional Prosedur pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **SUB BIDANG DIBAWAH KEPALA BIDANG**

- a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
- b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang Bela Negara Pembauran, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

### **➤ BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

#### **Tugas**

Bidang Politik melaksanakan tugas membantu Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik. Pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

#### **Fungsi**

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik. Pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten.
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi

kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik. Pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten.

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik. Pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten.
- d. Pelaksanaan koordinasi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik. Pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik. Pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten.
- f. Pengordinasian Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Di Bidang Politik Dalam Negari
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **SUB BIDANG DIBAWAH KEPALA BIDANG**

- a. Sub Bidang Politik dan peningkatan demokrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evalusi dan pelaporan di bidang politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
- b. Sub Bidang fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik.

➤ **BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN**

**Tugas**

Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial ,budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawas ormas dan ormas asing.

**Fungsi**

Bidang Ketahanan Ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial ,budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawas ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten.
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial ,budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi

pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawas ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten.

- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial ,budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawas ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial ,budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawas ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten.
- e. Pengordinasian Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial ,budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **SUB BIDANG DIBAWAH KEPALA BIDANG**

- a. Sub Bidang Ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya agama mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja

- perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial ,budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitiasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan.
- b. Sub bidang bidang organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

➤ **BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK**

**Tugas**

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Kewaspadaan Nasional.

**Fungsi**

Bidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan dan Penanganan Konflik fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaam kewaspadaan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaam

- kewaspadaan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaam kewaspadaan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.
  - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaam kewaspadaan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaam kewaspadaan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.
  - f. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten
  - g. Pengordinasian pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten musi rawas sesuai dengan tugas dan fungsi nya.

### **SUB BIDANG DIBAWAH KEPALA BIDANG**

- b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan kerjasama intelijen mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi monitoring , evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga

- asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan.
- c. Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan bahan penyiapan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD**

Isu-isu penting yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut:

- 1. Belum Optimal pembinaan terhadap Orsopol, LSM dan OKP guna terwujudnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 2. Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi;
- 3. Maraknya praktek percaloan dan premanisme yang sangat meresahkan kehidupan masyarakat;
- 4. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa;
- 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang ketertiban umum.

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

## **2.5. Penelaahan Usulan Program**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, Profesi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang disajikan, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Untuk mewujudkan misi pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tujuan yang dipakai adalah sebagai berikut:

##### **3.2.1. Tujuan**

1. Meningkatnya Implementasi Hak – Hak Politik dan Lembaga Demokrasi Institusi
2. Meningkatnya Implementasi kebebasan sipil dalam masyarakat

##### **3.2.2. Sasaran**

1. Meningkatnya implementasi pancasila dan nilai – nilai kebangsaan pada masyarakat
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak – hak politik untuk pembangunan daerah
3. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Rencana Kerja**

Rancangan RKPD atau Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
    - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.
- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
  - a. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
  - a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
  - a. Sosialisasi Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba bagi Pelajar
  - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
  - c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
  - d. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

## **4.2. Pendanaan Perangkat Daerah**

Pendanaan Perangkat Daerah Terlampir

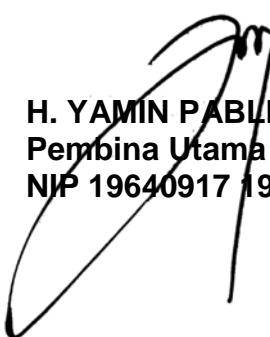
## **BAB V**

## **PENUTUP**

Dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia yang dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian dibidang kemasyarakatan dan pembangunan.

Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketiaatan dan disiplin para aparatur penyelenggara pemerintah. Untuk itu, diharapkan aparatur, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dengan dukungan bersama-sama bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen ini.

**Muara Beliti, Desember 2021**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS**

  
**H. YAMIN PABLI, SE.,M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19640917 199301 1 002

**Lampiran  
Program dan kegiatan**

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022**  
Kabupaten Musi Rawas

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan									
Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target																	
8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											3,255,478,772							
8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											124,657,800							
8	01	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	44,626,600										
8	01	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	7,676,600										
8	01	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	7,934,000										
8	01	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	7,676,600										
8	01	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	7,934,000										
8	01	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	41,089,500										
8	01	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	7,720,500										
8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,341,768,422							
8	01	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	2,290,813,622										
8	01	01	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	40,091,100										
8	01	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD							Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	10,863,700										
8	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											12,725,400							
8	01	01	2.03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	12,725,400										
8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											245,886,500							
8	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	11,487,000										
8	01	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	15,000,000										
8	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	3,847,500										
8	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	12,000,000										

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022**  
Kabupaten Musi Rawas

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan		Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
							Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	203,552,000	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>389,452,150</b>	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	3,000,000	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	73,703,000	
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	312,749,150	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>140,988,500</b>	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	117,988,500	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	23,000,000	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>									<b>257,026,800</b>	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>									<b>257,026,800</b>	
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	143,516,200	
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	113,510,600	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>									<b>1,232,592,700</b>	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>									<b>1,232,592,700</b>	
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah								Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	101,321,300	
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	1,131,271,400	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>									<b>380,497,400</b>	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>									<b>380,497,400</b>	
8	01	04	2.01	02	Perumusan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	241,760,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022**  
**Kabupaten Musi Rawas**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan		Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
							Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	138,737,400	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>									<b>217,297,500</b>	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>									<b>217,297,500</b>	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	217,297,500	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>									<b>300,400,400</b>	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>									<b>300,400,400</b>	
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	108,257,600	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota								Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	192,142,800	
<b>TOTAL</b>													<b>5,643,293,572</b>		

Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
Dan Politik Kabupaten Musi Rawas,

  
YAMIN PABLI, SE, MM  
NIP. 196409171993011002

## Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
8		<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>													
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								10,884,069,479					11,484,141,427
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,801,428,579					5,179,825,677
8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						460,355,800					404,645,620
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				122,696,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				36,542,550
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				57,742,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				63,516,860
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				58,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				63,800,000
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				57,742,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				63,516,860
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				58,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				63,800,000
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				72,953,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,248,850
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				33,220,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				33,220,500
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3,051,256,129					3,356,381,742

## Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				2,952,891,329	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,248,180,462
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				69,801,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			76,781,210
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				28,563,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31,420,070
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					<b>30,425,400</b>				<b>33,467,940</b>
8	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				30,425,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,467,940
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>645,213,000</b>				<b>709,734,300</b>
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				10,087,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,095,700
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				115,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			127,050,000
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				34,721,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			38,193,100
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13,200,000

## Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				472,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				520,195,500
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>390,512,150</b>					<b>429,563,365</b>
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,300,000
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				74,453,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				81,898,300
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				313,059,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				344,365,065
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>223,666,100</b>					<b>246,032,710</b>
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				167,666,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				184,432,710
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				56,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				61,600,000
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>					<b>1,024,882,800</b>					<b>679,540,510</b>
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>					<b>1,024,882,800</b>					<b>679,540,510</b>
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				562,276,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				170,673,360

## Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Musi Rawas,			157,448,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			173,193,790
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Musi Rawas,			155,157,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			170,673,360
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Musi Rawas,			150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			165,000,000
8	01	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>				<b>1,933,675,800</b>				<b>2,188,284,710</b>
8	01	03	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>				<b>1,933,675,800</b>				<b>2,188,284,710</b>
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Musi Rawas,			150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			243,769,460
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Musi Rawas,			101,321,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			93,925,300

## Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				221,608,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			243,769,460
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				1,460,745,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,606,820,490
8	01	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>					<b>726,271,400</b>				<b>798,898,540</b>
8	01	04	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>					<b>726,271,400</b>				<b>798,898,540</b>
8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			165,000,000
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				576,271,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			633,898,540
8	01	05			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>					<b>1,054,497,500</b>				<b>1,159,947,250</b>
8	01	05	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>					<b>1,054,497,500</b>				<b>1,159,947,250</b>
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			165,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Musi Rawas**  
**Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				904,497,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			994,947,250	
8	01	06			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>									1,343,313,400				1,477,644,740
8	01	06	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>									1,343,313,400				1,477,644,740
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			165,000,000	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				181,584,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			199,743,280	
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				263,969,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			290,366,780	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru				747,758,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			822,534,680	
<b>TOTAL</b>													<b>10,884,069,479</b>				<b>11,484,141,427</b>	